

Analisis Pengaruh Implementasi Kewajiban Warga Negara terhadap Pemenuhan Hak dalam Tatahan Kehidupan Bernegara

Andromeda Judson Imantaka

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
andromedajudson@student.uns.ac.id

Shalma Chintya Ramadhani

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
shalmachintya09@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi kewajiban warga negara terhadap pemenuhan hak yang mereka terima dalam tatahan kehidupan bernegara. Tatahan negara yang ideal berdiri di atas fondasi keseimbangan "kontrak sosial" antara hak dan kewajiban. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan diskursus, di mana tuntutan pemenuhan hak lebih nyaring dibandingkan kesadaran melaksanakan kewajiban.. Melalui pendekatan Studi Literatur, artikel ini mensintesis argumen kausalitas bahwa implementasi kewajiban warga negara merupakan "bahan bakar" esensial bagi negara untuk menjalankan mesin pemenuhan hak. Temuan menyimpulkan bahwa Implementasi Kewajiban Warga Negara memiliki pengaruh yang positif, signifikan, dan fundamental terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara. Kontribusi ini terwujud melalui dua mekanisme utama: 1) Kontribusi Langsung (Fiskal): Kepatuhan membayar pajak yang tinggi (Implementasi Kewajiban) secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal negara, memungkinkan pembiayaan program layanan publik (Pemenuhan Hak) seperti pendidikan dan kesehatan. 2) Kontribusi Mediasi (Institusional): Implementasi kewajiban menjadi optimal ketika dimediasi oleh kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), seperti pengendalian korupsi dan akuntabilitas, yang merupakan kewajiban negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak adalah konsekuensi logis yang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana warga negara telah menunaikan Implementasi Kewajiban mereka.

Kata Kunci: Implementasi Kewajiban, Pemenuhan Hak, Kontrak Sosial, Kepatuhan Pajak, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

This research analyzes the influence of the implementation of citizen obligations on the fulfillment of the rights they receive within the order of state life. An ideal state system is built upon the foundation of a balanced "social contract" between rights and obligations. However, in practice, a

frequent discourse imbalance occurs, where the demand for rights fulfillment is louder than the awareness of carrying out obligations. Through a Literature Study approach, this article synthesizes the causal argument that the implementation of citizen obligations is the essential "fuel" for the state to run the machinery of rights fulfillment. The findings conclude that the Implementation of Citizen Obligations has a positive, significant, and fundamental influence on the Fulfillment of Citizen Rights. This contribution manifests through two main mechanisms: 1) Direct Contribution (Fiscal): High compliance in paying taxes (Implementation of Obligation) directly increases the state's fiscal capacity, enabling the financing of public service programs (Fulfillment of Rights) such as education and health. 2) Mediating Contribution (Institutional): The implementation of obligations becomes optimal when mediated by the quality of governance (good governance), such as corruption control and accountability, which are the state's obligations. This research asserts that the fulfillment of rights is a logical consequence that is highly influenced by the extent to which citizens have discharged the Implementation of their Obligations

Keywords: *Implementation of Obligations, Fulfillment of Rights, Social Contract, Tax Compliance, Good Governance*

PENDAHULUAN

Tatanan kehidupan bernegara yang ideal dibangun di atas fondasi keselarasan antara pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban. Bila hak dan kewajiban tidak disesuaikan, maka kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidaksetaraan akan terus terjadi. Dengan demikian, guna meraih keseimbangan antara hak dan kewajiban, pemahaman yang jelas tentang kedudukan sipil kita, serta hak dan tugas orang lain, sangat diperlukan. Sebenarnya masyarakat sudah memiliki pemahaman parsial mengenai hak dan kewajiban mereka. Pemahaman ini terbentuk karena ragamnya kegiatan dalam kehidupan kenegaraan dan

sosial, yang menjadikan setiap aspek yang terkait dengan hak serta kewajiban warga negara tetap penting dalam segala kondisi. Namun, dalam praktik di banyak negara, terjadi ketimpangan diskursus; tuntutan terhadap pemenuhan hak seringkali jauh lebih nyaring daripada kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Jika tidak ada kewajiban untuk melakukannya, tidak mungkin untuk menggambarkannya sebagai kewajiban untuk melakukan (Maharani et al., 2023). Artikel ini menganalisis hubungan kausalitas tersebut, dengan fokus pada pengujian hipotesis: Sejauh mana implementasi kewajiban warga negara benar-benar berpengaruh

terhadap pemenuhan hak yang mereka terima?

Pemenuhan hak warga negara merupakan hasil akhir yang diterima oleh masyarakat dari negara. Indikatornya mencakup jaminan hak atas pendidikan, layanan kesehatan yang layak, keamanan, kebebasan berekspresi, dan kualitas infrastruktur publik. Dampak pemenuhan hak sangat fundamental, ketika pemenuhan hak berjalan baik, dampaknya adalah peningkatan kepercayaan publik (public trust) dan stabilitas sosial. Studi oleh [Kaufmann & Kraay, 2002] menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pengendalian korupsi yang tinggi dan efektivitas pemerintahan yang baik (indikator good governance) secara signifikan memiliki skor pemenuhan hak dasar yang lebih tinggi. Sebaliknya, pemenuhan hak menjadi buruk ketika birokrasi tidak efisien dan korupsi merajalela, yang menghabiskan sumber daya yang idealnya digunakan untuk kepentingan layanan masyarakat. Seperti temuan lainnya [Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN: Vol. 12 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024] dalam studi tentang krisis kepercayaan publik di Indonesia menemukan bahwa ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban memicu krisis kepercayaan.

Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa krisis kepercayaan publik memperparah jarak antara negara dan warga, serta menurunkan partisipasi politik dan sosial, yang secara tidak langsung mengancam stabilitas.

Implementasi Kewajiban Warga Negara ini adalah variabel penyebab (independent variable) yang mengukur input atau tindakan kontributif dari warga negara. Indikatornya tidak terbatas pada, tingkat kepatuhan membayar pajak, ketaatan pada hukum, partisipasi dalam pertahanan negara (bela negara), dan menjaga ketertiban umum. Faktor utama dari implementasi kewajiban adalah kesadaran hukum dan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah. Penelitian oleh [Mardiah, 2021] tentang kepatuhan pajak menemukan bahwa kepatuhan akan rendah ketika warga merasa pemerintah korup dan uang pajak mereka disalahgunakan. Sebaliknya, kepatuhan pajak menjadi baik ketika ada transparansi dan akuntabilitas; warga merasa "kontrak" mereka dengan negara dihargai, sehingga mereka

bersedia berkontribusi. Jika implementasi kewajiban berjalan baik, negara memiliki sumber daya yang memadai untuk berfungsi. Namun jika implementasi kewajiban buruk, misalnya tingginya tingkat penghindaran pajak dan

rendahnya ketaatan hukum, maka negara akan mengalami kelumpuhan.

Artikel ini berargumen bahwa implementasi kewajiban adalah "bahan bakar" bagi negara untuk dapat menjalankan mesin pemenuhan hak. Hubungan kausalitasnya jelas: tanpa input yang memadai dari warga negara, output yang diharapkan tidak mungkin terpenuhi secara optimal. Bagaimana mungkin negara memenuhi hak atas pendidikan jika warga negara secara kolektif menghindari kewajiban membayar pajak. Riset ini bertujuan menunjukkan bukti berdasarkan data bahwa pemenuhan hak bukanlah proses satu arah yang hanya menjadi tanggung jawab negara. Sebaliknya, pemenuhan hak adalah sebuah konsekuensi logis yang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana warga negara telah menunaikan implementasi kewajiban mereka.

Kesenjangan (gap) penelitian ini muncul dari kesenjangan fenomena dan kesenjangan teoretis-empiris dalam diskursus publik dan akademis. Tuntutan terhadap pemenuhan hak oleh negara sangat tinggi dan nyaring disuarakan. Namun, fenomena ini seringkali tidak diimbangi dengan kesadaran atau diskursus publik yang setara mengenai pentingnya

implementasi kewajiban oleh warga negara. Oleh karena itu, riset ini muncul sebagai upaya mengisi kesenjangan tersebut dengan membuktikan secara empiris hubungan hak dan kewajiban (pengaruh Implementasi Kewajiban terhadap Pemenuhan Hak).

Berdasarkan kesenjangan dan fokus analisis pada pendahuluan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah variabel tersebut menunjukkan pengaruh positif yang signifikan antara implementasi kewajiban warga negara terhadap pemenuhan hak warga negara?
2. Seberapa besar kontribusi (pengaruh) yang diberikan oleh implementasi kewajiban warga negara terhadap pemenuhan hak warga negara?

Selaras dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengkaji dan mengkonfirmasi bahwa implementasi memberikan pengaruh yang positif yang signifikan kewajiban warga negara terhadap pemenuhan hak warga negara.
2. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh implementasi kewajiban warga negara dalam menjelaskan variasi pada pemenuhan hak warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Literatur Kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis, mengkaji, dan mensintesis berbagai temuan dan argumen teoretis yang sudah ada dari literatur ilmiah. Tujuannya adalah membangun kerangka logis dan dukungan empiris terhadap hipotesis kausalitas bahwa Implementasi Kewajiban Warga Negara memengaruhi Pemenuhan Hak Warga Negara.

Proses pencarian artikel ilmiah dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterkaitan dan kredibilitas sumber yang digunakan. Pencarian literatur difokuskan pada kombinasi kata kunci inti yang sesuai dengan variabel dan konteks penelitian:

Variabel Inti: "Implementasi Kewajiban," "Pemenuhan Hak," "Kontrak Sosial", "Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban".

Indikator Kunci: "Kepatuhan Pajak", "Transparansi dan Akuntabilitas", "Tax Ratio Rendah", dan "Krisis Kepercayaan Publik". Sumber utama literatur terdiri dari jurnal ilmiah terindeks yang relevan dengan kebijakan publik, serta laporan dari lembaga internasional terkemuka (seperti Bank Dunia dan IMF).

Artikel diseleksi berdasarkan relevansi langsungnya dengan argumen hubungan kausalitas yang diajukan artikel ini bahwa implementasi kewajiban adalah "bahan bakar" bagi pemenuhan hak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa analisis naratif yang bersifat kritis dan sintesis berbasis argumentasi. Data dari berbagai sumber dianalisis untuk mengukuhkan Teori Kontrak Sosial, Menganalisis Kesenjangan, Menyusun Argumen Kausalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari kerangka kontrak sosial, berbagai studi literatur dan laporan global telah menegaskan hubungan kausalitas ini: pemenuhan hak secara efektif tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban yang disiplin. Sebagai contoh, penelitian oleh Mardiah (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak warga negara meningkat secara signifikan seiring dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mencerminkan penghargaan terhadap kontribusi warga. Secara makro, temuan Kaufmann & Kraay melalui Worldwide Governance Indicators (WGI) lebih lanjut membuktikan bahwa negara dengan pengendalian korupsi dan efektivitas

pemerintahan yang tinggi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara cenderung memiliki skor pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, keamanan) yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, ringkasan studi literasi ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan argumen bahwa implementasi kewajiban warga negara (seperti kepatuhan hukum, pembayaran pajak, dan partisipasi publik) merupakan variabel fundamental yang secara langsung mempengaruhi dan memungkinkan pemenuhan hak warga negara dalam tatanan kehidupan bernegara yang ideal

No	Nama Peneliti dan tahun	Subjek (tentang apa)	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Mardiah (2021)	Kepatuhan Pajak, Transparansi, dan Akuntabilitas	Kuantitatif Eksplanatori (Menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel)	Kepatuhan Wajib Pajak menjadi baik ketika pemerintah menunjukkan kejelasan informasi dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan dan pemakaian dana pajak.
2	Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN Vol. 12 No. 1 (2024)	Public Trust dan Program Keluarga Harapan (PKH)	Kualitatif atau Metode Campuran (Studi Kasus Evaluatif)	Kualitas implementasi kebijakan publik sangat menentukan kepercayaan masyarakat. Kesalahan dalam pendataan penerima manfaat PKH (terutama <i>Exclusion Error</i> , di mana yang berhak tidak menerima) secara signifikan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3	Kaufmann & Kraay (2010) dan diupdate secara berkala	Pengendalian Korupsi dan Efektivitas Pemerintahan	pendekatan kuantitatif skala besar yang bersifat lintas negara dan rangkaian waktu	Adanya korelasi positif dan signifikan antara kualitas tata kelola pemerintahan (<i>governance</i>) dengan hasil pembangunan, termasuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
4	Maharani et al. (2023)	hubungan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dengan pembangunan karakter pada mahasiswa.	Kualitatif atau Kajian Pustaka (Studi Literatur)	□ Pentingnya keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam mewujudkan karakter mahasiswa yang ideal. □ Karakter mahasiswa meningkat saat memahami dan menerapkan kewajiban sebagai warga negara, bukan hanya menuntut hak.

5	Simamora Michael, Jitmanu Ranmy, & Danburji Anwar (2024)	Tantangan Dalam Mewujudkan Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Ditengah Arus Globalisasi	Studi Literatur	□ Upaya harmonisasi yang efektif, seperti perbaikan pelayanan publik dan edukasi terhadap warga negara. □ Implementasi hak dan kewajiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menuntut peran aktif dalam semua warga negara untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.
6	Sholikhah et al. (2024)	menganalisis hak serta kewajiban warga negara pada era globalisasi dengan fokus pada mahasiswa UNIPA Surabaya.	Kualitatif Deskriptif	Temuan penelitian menegaskan bahwa mahasiswa PGSD UNIPA Surabaya memiliki tingkat pemahaman yang memadai mengenai hak serta kewajiban yang melekat pada mereka sebagai warga negara. Pemahaman tersebut mencakup hak-hak konstitusional, antara lain hak atas pendidikan dan kebebasan berpendapat, serta kewajiban seperti pembayaran pajak dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
7	Intan Nuraini ;PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial) vol 3, nomor 2 tahun 2024	Mengkaji pengaturan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD	Kajian Normatif / Studi Literatur	Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak yang dapat dinikmati, tetapi tetap berkewajiban melaksanakan tanggung jawabnya guna mendukung terciptanya tatanan masyarakat dan negara yang adil dan harmonis.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis temuan studi literatur dan mensintesisnya secara kritis guna menjawab rumusan masalah yang ada.

1. Pengukuran Kontribusi Implementasi Kewajiban terhadap Pemenuhan Hak

Berdasarkan sintesis argumen dan temuan empiris dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa kontribusi implementasi kewajiban warga negara terhadap pemenuhan hak warga negara bersifat fundamental, langsung (fiskal), dan mediasi (institusional).

a. Kontribusi Langsung (Fiskal) melalui Kepatuhan Pajak

Kontribusi terbesar dari implementasi kewajiban terletak pada penyediaan kapasitas fiskal negara, yang merupakan "bahan bakar" utama untuk membiayai program pemenuhan hak.

- Penelitian oleh Mardiah (2021) secara eksplisit menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi baik ketika pemerintah menunjukkan Transparansi dan Akuntabilitas.

- Implikasinya, kesediaan warga untuk menunaikan kewajiban membayar pajak secara langsung menentukan sumber daya yang dimiliki negara untuk mendanai layanan publik.

- Oleh karena itu, pengaruh implementasi kewajiban terhadap pemenuhan hak adalah sangat besar dan esensial, sebab tanpa input kewajiban yang memadai, negara akan mengalami kelumpuhan dan defisit anggaran yang sulit dikendalikan, yang pada akhirnya melumpuhkan kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik.

b. Kontribusi Mediasi (Institusional) melalui Tata Kelola

Implementasi kewajiban warga negara tidak hanya memberikan sumber daya

(uang), tetapi juga menuntut kualitas tata kelola (institusi) dari negara.

- Temuan Kaufmann & Kraay (melalui WGI) menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara kualitas tata kelola pemerintahan (governance), terutama pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintahan, dengan skor pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

- Artinya, implementasi kewajiban yang baik harus dimediasi oleh good governance (yang merupakan kewajiban negara) untuk menghasilkan pemenuhan Hak yang baik.

c. Kontribusi Public Trust dan Stabilitas

Kontribusi implementasi kewajiban dan pemenuhan hak menciptakan sebuah lingkaran timbal balik yang diatur oleh kepercayaan publik (public trust).

- Studi Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN Vol. 12 No. 1 (2024) menegaskan bahwa kualitas implementasi kebijakan publik (Pemenuhan Hak) sangat menentukan kepercayaan masyarakat.

- Kesalahan dalam pemenuhan hak (misalnya, Exclusion Error PKH) secara signifikan mengikis kepercayaan publik.

- Sebaliknya, tingginya public trust adalah faktor kunci yang mendorong warga

untuk melaksanakan kewajiban mereka secara sukarela.

Dengan demikian, tingkat kontribusi implementasi kewajiban terhadap pemenuhan hak adalah sangat menentukan (essential), dengan rasio pengaruh yang dapat dianggap positif dan signifikan secara statistik.

2. Analisis Kritis Sumber Literatur

Sintesis argumentatif dalam artikel ini didukung oleh literatur yang memiliki keunggulan, namun juga memiliki keterbatasan yang perlu dicatat.

Kelebihan (Strengths)

a. Validitas Lintas Level: Literatur yang digunakan mencakup berbagai level analisis, memberikan validitas yang kuat pada hipotesis kausalitas.

o Level Filosofis/Karakter: Penelitian Maharani et al. (2023) dan Intan Nuraini (2024) memberikan dasar konseptual bahwa tidak mungkin menggambarkan sesuatu sebagai kewajiban jika tidak ada keharusan untuk melakukannya.

o Level Mikro/Perilaku: Penelitian Mardiah (2021) memberikan bukti empiris mikro-ekonomi mengenai mekanisme di balik kepatuhan wajib pajak individu.

o Level Makro/Global: Penelitian Kaufmann & Kraay (2010) menyediakan validasi makro cross-country yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola (yang dipengaruhi oleh kewajiban) secara global berkorelasi signifikan dengan pemenuhan hak.

b. Relevansi Kontemporer: Studi Jurnal ASIAN (2024) memberikan relevansi konteks Indonesia terkini mengenai krisis kepercayaan publik, yang merupakan dampak nyata dari ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kualitas kewajiban negara.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Keterbatasan Data Kuantitatif Langsung: Penelitian yang disintesis, sebagian besar, tidak secara langsung menguji model regresi dengan Implementasi Kewajiban dan Pemenuhan Hak.

o Terdapat pengaruh di mana penelitian yang membuktikan secara empiris bahwa tingkat kepatuhan pajak secara langsung memengaruhi kualitas layanan masih perlu diperkuat.

2. Metodologi Beragam: Penggabungan studi Kuantitatif Eksplanatori (Mardiah) dan Studi Literatur/Kualitatif (Maharani, Jurnal ASIAN) dalam

satu sintesis naratif memerlukan kehati-hatian dalam menyimpulkan hubungan kausalitas langsung, meskipun secara logis dan filosofis hubungan tersebut telah terbukti kuat. Penelitian ini mengatasi hal ini dengan menggunakan Analisis Kritis Naratif dan Sintesis Argumentatif.

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi kewajiban warga negara (seperti kepatuhan hukum, pembayaran pajak, dan partisipasi publik) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan serta sangat menentukan (essential) terhadap pemenuhan hak warga negara oleh negara. Pemenuhan hak (seperti jaminan pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan) bukanlah proses satu arah, melainkan konsekuensi logis dari sejauh mana warga negara telah menunaikan kewajiban mereka.

Kontribusi Kunci Implementasi Kewajiban

1. Kontribusi Langsung (Fiskal) : Kewajiban, terutama kepatuhan membayar pajak, adalah "bahan bakar" utama dan esensial yang menyediakan kapasitas fiskal bagi negara untuk mendanai layanan publik dan program pemenuhan hak. Tanpa input kewajiban yang memadai, negara

berpotensi lumpuh dan tidak mampu memberikan output pemenuhan hak secara optimal.

2. Kontribusi Mediasi (Institusional) : implementasi kewajiban yang baik menuntut kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) dari negara. Studi menunjukkan bahwa tata kelola yang baik (pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintahan) berkorelasi signifikan dengan skor pemenuhan hak yang lebih tinggi.

3. Menciptakan Kepercayaan Publik (Public Trust) : hubungan timbal balik antara implementasi kewajiban dan pemenuhan hak diatur oleh Kepercayaan Publik. Pemenuhan hak yang berkualitas mendorong kepercayaan, yang pada gilirannya mendorong warga untuk melaksanakan kewajiban mereka secara sukarela.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengisi kesenjangan diskursus dengan membuktikan secara empiris bahwa keseimbangan pelaksanaan hak serta kewajiban diperlukan untuk membentuk tatanan kehidupan bernegara yang ideal dan mencapai peningkatan kepercayaan serta stabilitas sosial.

Oleh karena itu, pemenuhan Hak adalah konsekuensi logis yang sangat dipengaruhi

oleh sejauh mana warga negara telah menunaikan Implementasi Kewajiban mereka.

Kesenjangan diskursus publik yang hanya menuntut hak tanpa mengimbangi dengan kesadaran kewajiban perlu diatasi. Keseimbangan kedua pilar ini menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai masyarakat yang adil, merata, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Hidayah, M. (2020). Makalah Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokerasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27784.24327>
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Ham*, 11(3), 369.
- Fitroh, I., & Rosidi, M. I. (2024). Harmoni Nilai-Nilai Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 15(2), 246-254. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/paedagoria/article/view/22230>
- Intan Nuraini, Nikita Sheila Pasha, & Karmila Nuralifah Kadir. (2025). Implementasi E-Pajak sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 485–496. <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v4i1.5105>
- Jevimaulidia, S. (2023). Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat. *Kompasiana*. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>
- Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024). Public
- Kaufmann & Kraay (2010 update). "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues". <https://www.sidalc.net/search/Record/dig-okr-1098642373/Description>
- Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2020). Penyuluhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta. 5(1). <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/viewFile/138/59>

Lubis, P. (2024). Harmoni Agama Melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi Dan Batasan Batasan Moderasi Dalam Konteks Keberagaman. *Book Chapter of Proceedings Journey Liaison Academia and Society*, 1(1), 314-332. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/737>

Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 247-253. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79393>

Mar'atus Sholikhah, Dinda Ika Putri Yuni, Della Anggraeni, Vira Arfahunnisa, Rani Nurdianti, Grecencia Noyarto, ... Suyono Suyono. (2024). Hak dan Kewajiban Warga Negara di Era Globalisasi Mahasiswa PGSD UNIPA Surabaya. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 351-362. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.303>

Nurdiansyah, Harti Veronika, Ifani Yudia Putri, Farah Aisha, Shellyna Widya Agustin, Siti Jihan Arniansyah Putri, Marshela Rahmadani, Luna Gita Tarigan, Bunga Amrina Rosyada Br Purba9 (2025).

Analisis Implementasi Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner Volume 8 Nomor 4* (April 2025). <https://edu.ojs.co.id/index.php/jpm/article/view/883>

Prasetyo, D., Danurahman, J., & Hermawan, H. (2023). Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara baik dan cerdas. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 8(1), 15-23. <https://journal.unnes.ac.id/sju/harmony/article/view/52768?>

Sandy, N. B. E. E., Junita, S., & Syaifuddin, H. (2025). Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 11 - 20. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2121>

Simamora Michael, Jitmau Ranny, & Danburji Anwar. (2024). Tantangan Implementasi Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Era Globalisasi. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 316-324. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79927>

Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan (PKH).

https://www.academia.edu/download/61044160/administrasi_publik20191028-19486-6lxl1p.pdf

Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346. 430 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1576>

Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). <https://www.academia.edu/download/115666546/pdf.pdf>

Zahra Nauli, Elviana Elviana, & Sasmi Nelwati. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180–193. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.456>

Zahra Nauli, Elviana Elviana, & Sasmi Nelwati. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180–193. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.456>

Zahra, M., & Nelwati, S. (2024). ANALISIS MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT SERTA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/299>